

# Analisis Dampak Kebijakan Pemerintah pada Industri Nikel di PT Indonesia Huabao Industrial Park Morowali

Zaenal Arif Mohamad Kasim <sup>1,\*</sup>, Mahfuzat <sup>2</sup>, Sulfitri Husain <sup>3</sup>,

<sup>1</sup>Universitas Tadulako, Palu, Indonesia, zaenalarif0222@gmail.com

<sup>2</sup>Universitas Tadulako, Palu, Indonesia, mahfuzat.lamakampali@gmail.com

<sup>3</sup>Universitas Tadulako, Palu, Indonesia, sulfitrih@gmail.com

\*Correspondence : zaenalarif0222@gmail.com

## ARTICLE INFO:

Kata kunci: *kebijakan publik, industri nikel, dampak sosial, masyarakat lokal, evaluasi kebijakan*

Received : Maret 2026

Revised : April 2026

Accepted : April 2026

## ABSTRAK:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan pemerintah terkait industri nikel melalui PT Indonesia Huabao Industrial Park (IHIP) terhadap kehidupan sosial masyarakat di Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis penelitian mengacu pada teori evaluasi dampak kebijakan menurut Samodra Wibawa (1994) yang meliputi dampak individual, organisasional, masyarakat, serta lembaga dan sistem sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan industri nikel memberikan dampak sosial yang signifikan, antara lain perubahan mata pencaharian, terbatasnya akses terhadap sumber penghidupan tradisional, meningkatnya potensi konflik sosial, serta melemahnya kondisi sosial masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan industri nikel belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan sosial dan keberlanjutan.

## ABSTRACT:

*This study aims to analyze the impact of government policies related to the nickel industry through PT Indonesia Huabao Industrial Park (IHIP) on the social life of communities in Bungku Barat District, Morowali Regency. This research employs a qualitative approach with a descriptive type. Data were collected through interviews, observations, and documentation. The analysis refers to the policy impact evaluation theory proposed by Samodra Wibawa (1994), which includes individual, organizational, societal, as well as institutional and social system impacts. The results indicate that the nickel industry policy has significant social impacts, including changes in livelihoods, limited access to traditional sources of income, increased potential for social conflict, and the weakening of social conditions within the community. This study concludes that the nickel industry policy has not fully reflected the principles of social justice and sustainability.*

## Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara dengan cadangan dan produksi nikel terbesar di dunia, sehingga memiliki posisi strategis dalam rantai pasok industri

global, khususnya dalam mendukung kebutuhan energi terbarukan dan baterai kendaraan listrik. Peningkatan permintaan global terhadap nikel mendorong percepatan pengembangan industri pertambangan serta kebijakan hilirisasi di berbagai wilayah Indonesia (Hanifah *et al.*, 2025). Kebijakan hilirisasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam melalui pembangunan kawasan industri berbasis nikel (Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral, 2021). Dalam konteks ini, Pulau Sulawesi menjadi pusat pengembangan industri nikel karena didukung oleh ketersediaan sumber daya yang melimpah serta pembangunan smelter dan industri pengolahan (Hidayat, 2025).

Pulau Sulawesi juga ditetapkan sebagai salah satu koridor ekonomi dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang berfokus pada pengembangan sektor pertambangan dan energi. Pengembangan ini diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan mendorong pertumbuhan ekonomi regional (Womal, 2023). Salah satu wilayah strategis dalam pengembangan industri nikel adalah Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, yang didukung oleh ketersediaan sumber daya dan investasi industri berskala besar (Haryadi, 2018).

Seiring meningkatnya investasi industri nikel, kawasan industri berkembang pesat, salah satunya melalui aktivitas PT Indonesia Huabao Industrial Park (IHIP) di Kecamatan Bungku Barat. Kehadiran industri ini diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal, seperti peningkatan kesempatan kerja dan pendapatan daerah (Lampe, 2021). Namun demikian, perkembangan industri ekstraktif juga menimbulkan berbagai dampak sosial dan lingkungan yang kompleks. Aktivitas pertambangan tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga memunculkan persoalan seperti konflik sosial, perubahan mata pencaharian, serta pencemaran lingkungan (Karsadi and Aso, 2023).

Dalam konteks kebijakan, kegiatan industri pertambangan diwajibkan memenuhi ketentuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai instrumen pengendalian dampak (Presiden Republik Indonesia, 2009). Selain itu, regulasi pertambangan juga menekankan pentingnya tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat sekitar tambang (Presiden Republik Indonesia, 2020). Meskipun demikian, implementasi kebijakan tersebut sering menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya koordinasi, dan rendahnya kapasitas institusi (Addawiyah, Febrian and Fadillah, 2025).

Dalam praktiknya, kehadiran industri nikel di Kecamatan Bungku Barat tidak hanya membawa perubahan ekonomi, tetapi juga memunculkan persoalan sosial yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Perubahan fungsi lahan dari sektor agraris ke kawasan industri telah mengurangi akses masyarakat terhadap sumber penghidupan tradisional. Selain itu, konflik lahan, keterbatasan akses terhadap fasilitas umum, serta perubahan struktur sosial menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara kepentingan industri dan kebutuhan masyarakat lokal. Kondisi ini diperparah oleh

lemahnya komunikasi antara perusahaan dan masyarakat yang berpotensi menimbulkan ketegangan sosial.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa aktivitas pertambangan memiliki dampak signifikan terhadap perubahan sosial masyarakat, baik dalam struktur sosial, mata pencaharian, maupun interaksi sosial (Karsadi and Aso, 2023). Penelitian oleh (Ningsih and Nawireja, 2023) menemukan adanya pergeseran mata pencaharian dari sektor agraris ke sektor industri. Selain itu, konflik lahan menjadi dampak utama dari ekspansi industri pertambangan akibat ketidaksesuaian kepentingan dan kurangnya partisipasi masyarakat (Fauzi and Nulhaqim, 2024). Dampak lingkungan seperti pencemaran dan degradasi lahan juga berimplikasi pada kondisi sosial ekonomi masyarakat (Waniatri, Muslihudin and Lestari, 2022). Implementasi kebijakan pertambangan dinilai belum optimal dalam melindungi hak masyarakat akibat lemahnya pengawasan dan rendahnya partisipasi publik (Permata, Safiranita and Utama, 2019).

Meskipun berbagai penelitian telah mengkaji dampak industri pertambangan, sebagian besar masih berfokus pada aspek ekonomi dan lingkungan, serta belum secara komprehensif menganalisis dampak kebijakan industri nikel dari perspektif evaluasi kebijakan publik, khususnya pada tingkat lokal. Oleh karena itu, terdapat kebutuhan untuk mengkaji lebih mendalam mengenai bagaimana kebijakan industri nikel diimplementasikan serta dampaknya terhadap kehidupan sosial masyarakat.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan pemerintah terkait industri nikel melalui PT Indonesia Huabao Industrial Park (IHIP) terhadap kehidupan sosial masyarakat di Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali. Analisis ini menggunakan perspektif evaluasi dampak kebijakan menurut Samodra Wibawa (1994) yang meliputi dampak individual, organisasional, masyarakat, serta lembaga dan sistem sosial. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan yang lebih berkeadilan sosial dan berorientasi pada keberlanjutan (Tahalea, Suwitri and Rostyaningsih, 2015).

## Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif untuk memahami secara mendalam fenomena dampak kebijakan industri nikel terhadap kehidupan sosial masyarakat berdasarkan kondisi nyata di lapangan. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali makna, pandangan, serta pengalaman informan secara komprehensif sesuai dengan fokus penelitian.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara mendalam dan observasi lapangan. Wawancara dilakukan secara tatap muka dengan informan yang dipilih secara *purposive*, yaitu pihak-pihak yang dianggap memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung terhadap permasalahan penelitian. Informan dalam penelitian ini meliputi Camat Bungku Barat, aparat pemerintah desa sebanyak dua orang, tokoh masyarakat satu orang, masyarakat terdampak sebanyak tiga orang, serta perwakilan

dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) satu orang. Wawancara bertujuan untuk memperoleh informasi terkait pengalaman, persepsi, serta dinamika sosial yang terjadi akibat kebijakan industri nikel di wilayah penelitian.

Observasi dilakukan secara langsung di Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali, untuk mengamati kondisi sosial masyarakat serta perubahan yang terjadi akibat aktivitas industri nikel. Melalui observasi ini, peneliti memperoleh gambaran empiris mengenai situasi di lapangan yang tidak selalu dapat diungkap melalui wawancara.

Selain data primer, penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui teknik dokumentasi. Data sekunder meliputi dokumen resmi, laporan, arsip, serta literatur yang relevan dengan penelitian. Data ini digunakan untuk melengkapi dan memperkuat temuan dari data primer.

Analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sejak proses pengumpulan data hingga penelitian selesai. Tahapan analisis meliputi reduksi data, yaitu proses pemilihan dan pemfokusan data yang relevan, penyajian data dalam bentuk uraian naratif, serta penarikan kesimpulan berdasarkan pola dan hubungan antar temuan yang diperoleh di lapangan.

## Hasil

### 1. Dampak Individual

Kebijakan industrialisasi melalui operasional PT Indonesia Huabao Industrial Park (IHIP) di Kecamatan Bungku Barat menimbulkan berbagai konsekuensi pada tingkat individu, baik secara ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Dalam perspektif evaluasi kebijakan menurut Samodra Wibawa (1994), dampak individual merupakan manifestasi langsung dari implementasi kebijakan yang tercermin melalui perubahan kesejahteraan, peran sosial, serta tekanan psikologis yang dialami masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan adanya pergeseran struktur ekonomi individu dari sektor tradisional seperti pertanian, perkebunan, dan perikanan menuju sektor industri dan jasa. Pergeseran ini memunculkan dinamika adaptasi, di mana sebagian masyarakat beralih ke sektor industri, sementara sebagian lainnya tetap bertahan pada mata pencaharian tradisional yang semakin terdesak.

Temuan wawancara dengan informan menunjukkan bahwa perubahan tersebut bersifat kontradiktif. Aktivitas ekonomi desa mengalami peningkatan yang ditandai dengan berkembangnya usaha seperti rumah kos, warung makan, dan penginapan. Kondisi berbeda dialami oleh masyarakat yang bergantung pada sektor pertanian, yang mengalami penurunan pendapatan akibat turunnya harga komoditas serta berkurangnya tenaga kerja produktif. Data produksi pertanian memperlihatkan tren penurunan, terutama pada komoditas cabai rawit yang mengalami fluktuasi dan cenderung menurun dalam beberapa tahun terakhir.

Industrialisasi juga berdampak pada sektor perikanan. Nelayan mengalami penurunan hasil tangkapan akibat perubahan kondisi lingkungan pesisir, seperti meningkatnya aktivitas kapal industri serta penurunan kualitas air laut. Kondisi ini

memicu displacement ekonomi, yaitu pergeseran dari sistem ekonomi tradisional yang relatif stabil menuju kondisi ekonomi yang lebih tidak menentu. Keterbatasan pendidikan dan keterampilan menjadi hambatan bagi nelayan untuk beralih ke sektor industri, sehingga tekanan ekonomi semakin meningkat.

Aspek sosial menunjukkan adanya perubahan pola interaksi masyarakat. Kehadiran industri dan arus masuk pendatang mendorong pergeseran nilai sosial dari pola kehidupan komunal menuju pola yang lebih individualistik. Aktivitas sosial seperti gotong royong mulai berkurang, disertai munculnya fenomena dekadensi moral di kalangan generasi muda, seperti perilaku konsumtif dan penyalahgunaan narkoba.

Dampak lingkungan dirasakan secara langsung oleh individu, terutama berupa polusi udara akibat debu dari aktivitas kendaraan berat serta meningkatnya volume sampah yang belum dikelola secara optimal. Kondisi ini tidak hanya memengaruhi kesehatan masyarakat, tetapi juga menurunkan kualitas lingkungan tempat tinggal.

Aspek psikologis memperlihatkan sikap ambivalen dalam masyarakat. Kehadiran industri dipandang sebagai peluang ekonomi, namun sekaligus menimbulkan tekanan akibat perubahan sosial dan ketimpangan distribusi manfaat. Samodra Wibawa (1994) menjelaskan bahwa ketidakmerataan manfaat kebijakan dapat menimbulkan perasaan *powerlessness*, yaitu kondisi ketika individu merasa tidak memiliki kendali atas perubahan yang terjadi dalam kehidupannya.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa manfaat industrialisasi belum terdistribusi secara merata. Masyarakat dengan keterampilan dan akses yang lebih baik cenderung memperoleh keuntungan ekonomi, sementara kelompok petani, nelayan, dan masyarakat berpendidikan rendah mengalami marginalisasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa industrialisasi tidak hanya menciptakan peluang, tetapi juga memperlebar kesenjangan sosial-ekonomi pada tingkat individu.

Kesimpulan menunjukkan bahwa dampak individual dari kebijakan industrialisasi di Kecamatan Bungku Barat bersifat kompleks dan multidimensional. Industrialisasi mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja, tetapi juga menimbulkan tekanan ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi sebagian masyarakat. Kondisi ini menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan belum sepenuhnya diikuti oleh pemerataan kesejahteraan, sehingga diperlukan intervensi kebijakan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

## 2. Dampak Organisasional

Kehadiran PT Indonesia Huabao Industrial Park (IHIP) di Kecamatan Bungku Barat memberikan pengaruh terhadap dinamika organisasi pemerintahan dan lembaga sosial di tingkat lokal. Dalam perspektif Samodra Wibawa (1994), dampak organisasional mencerminkan perubahan fungsi, kapasitas, serta hubungan antar-lembaga sebagai konsekuensi dari implementasi kebijakan publik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa industrialisasi mendorong terjadinya pergeseran peran organisasi pemerintahan lokal, baik di tingkat kecamatan maupun

desa. Pemerintah tidak lagi hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga berperan sebagai mediator antara kepentingan perusahaan dan masyarakat. Peran tersebut menempatkan pemerintah pada posisi yang kompleks karena harus menjaga keseimbangan antara orientasi profit perusahaan dan tuntutan kesejahteraan masyarakat.

Temuan wawancara dengan informan menunjukkan bahwa pemerintah kecamatan telah berupaya melakukan mediasi terhadap berbagai konflik yang muncul, seperti permasalahan lahan, kompensasi, serta dampak lingkungan. Efektivitas mediasi tersebut belum optimal akibat keterbatasan kewenangan, lemahnya koordinasi lintas lembaga, serta dominasi pengambilan keputusan oleh pihak perusahaan. Kondisi ini menunjukkan adanya tekanan kelembagaan yang menyebabkan aparatur pemerintah berada dalam posisi ambivalen, yaitu di satu sisi dituntut responsif terhadap masyarakat, sementara di sisi lain memiliki keterbatasan dalam mengintervensi kebijakan perusahaan.

Tingkat desa memperlihatkan peran organisasi pemerintahan sebagai penghubung langsung antara masyarakat dan perusahaan. Pemerintah desa menjadi wadah utama dalam menampung aspirasi masyarakat serta mengelola program tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR). Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan industri meningkatkan aktivitas pelayanan publik dan membuka peluang pembangunan desa. Kondisi tersebut diikuti oleh bertambahnya beban koordinasi, terutama dalam menangani keluhan masyarakat terkait dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Masuknya industri turut memicu perubahan dalam struktur sosial masyarakat yang berdampak pada organisasi lokal. Bertambahnya jumlah penduduk pendatang menimbulkan tantangan baru dalam pengendalian sosial, seperti meningkatnya potensi konflik, kriminalitas, serta tekanan terhadap infrastruktur desa. Kondisi ini mendorong organisasi pemerintahan desa untuk beradaptasi dengan cepat terhadap dinamika sosial yang semakin kompleks.

Aspek kelembagaan menunjukkan adanya asimetri kekuasaan, di mana pengambilan keputusan lebih dominan berada pada pihak perusahaan dan pemerintah pusat, sementara pemerintah daerah dan desa cenderung berperan sebagai pelaksana. Kondisi ini berdampak pada terbatasnya ruang partisipasi organisasi lokal dalam menentukan arah kebijakan pembangunan. Akibatnya, organisasi pemerintah lebih bersifat reaktif dalam merespons dampak dibandingkan proaktif dalam perencanaan.

Peran lembaga ekonomi lokal seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) belum optimal dalam memanfaatkan peluang yang dihasilkan oleh industrialisasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi peningkatan aktivitas ekonomi, kapasitas kelembagaan lokal belum cukup kuat untuk mengimbangi dominasi sektor industri.

Organisasi masyarakat sipil seperti LSM mengalami peningkatan peran dalam fungsi advokasi dan kontrol sosial. Lembaga ini berperan sebagai perantara antara masyarakat dan pemerintah dalam menyampaikan aspirasi serta mengawasi

kebijakan industri. Keterbatasan sumber daya, akses informasi, dan dukungan struktural menyebabkan efektivitas peran tersebut belum maksimal. Partisipasi masyarakat melalui jalur organisasi juga masih relatif rendah sehingga fungsi advokasi belum berjalan optimal.

Dampak organisasional yang muncul bersifat ambivalen. Industrialisasi mendorong peningkatan aktivitas organisasi, memperluas ruang koordinasi, serta memperkuat fungsi mediasi pemerintah. Kondisi tersebut juga menimbulkan tekanan kelembagaan berupa meningkatnya beban kerja, keterbatasan kewenangan, serta ketimpangan hubungan antar-aktor.

Temuan ini sejalan dengan pandangan Samodra Wibawa (1994) bahwa kebijakan publik dapat memberikan dampak ganda terhadap organisasi, yaitu mendorong adaptasi sekaligus menimbulkan tekanan struktural. Tanpa dukungan kapasitas yang memadai, organisasi lokal cenderung mengalami penurunan efektivitas dalam menjalankan fungsi koordinasi dan pelayanan publik.

Kesimpulan menunjukkan bahwa dampak organisasional dari kebijakan industrialisasi di Kecamatan Bungku Barat mencerminkan perubahan signifikan dalam fungsi, peran, dan hubungan antar-lembaga. Industrialisasi telah memperluas ruang interaksi dan kolaborasi, namun belum diiringi dengan penguatan kapasitas kelembagaan serta keseimbangan peran antar-aktor. Kondisi ini menegaskan perlunya upaya penguatan organisasi lokal, peningkatan koordinasi lintas sektor, serta pengembangan mekanisme partisipatif agar kebijakan industrialisasi dapat berjalan lebih efektif dan berkeadilan.

### **3. Dampak terhadap Masyarakat**

Industrialisasi melalui beroperasinya PT Indonesia Huabao Industrial Park (IHIP) di Kecamatan Bungku Barat membawa perubahan signifikan pada struktur sosial, ekonomi, dan kultural masyarakat. Dalam perspektif Samodra Wibawa (1994), dampak terhadap masyarakat mencerminkan sejauh mana kebijakan publik memengaruhi kemampuan komunitas dalam mempertahankan keseimbangan sosial serta memenuhi kebutuhan anggotanya di tengah perubahan struktural.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa industrialisasi mendorong transformasi masyarakat dari pola kehidupan agraris dan pesisir menuju sistem sosial yang lebih kompleks dan heterogen. Perubahan ini ditandai dengan meningkatnya aktivitas ekonomi, pertumbuhan usaha kecil, serta bertambahnya jumlah penduduk pendatang yang bekerja di sektor industri. Kondisi tersebut memberikan dampak positif berupa terbukanya lapangan kerja dan meningkatnya pendapatan sebagian masyarakat.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa manfaat industrialisasi tidak terdistribusi secara merata. Masyarakat yang bekerja di sektor tradisional seperti petani dan nelayan mengalami tekanan ekonomi akibat berkurangnya lahan produktif, menurunnya hasil produksi, serta perubahan kondisi lingkungan. Kondisi ini mencerminkan adanya ketimpangan distribusi manfaat dari kebijakan industrialisasi.

Aspek sosial memperlihatkan adanya pergeseran nilai dan pola interaksi masyarakat. Nilai-nilai komunal seperti gotong royong dan solidaritas sosial mengalami penurunan seiring meningkatnya orientasi ekonomi dan gaya hidup individualistik. Kehadiran pendatang mengubah struktur demografis masyarakat yang sebelumnya homogen menjadi lebih beragam, sehingga interaksi sosial menjadi semakin kompleks.

Perubahan struktur sosial turut memunculkan stratifikasi sosial baru dalam masyarakat. Perbedaan akses terhadap pekerjaan dan sumber pendapatan menciptakan jarak sosial antara kelompok yang bekerja di sektor industri dan kelompok yang bertahan di sektor tradisional. Kondisi ini berpotensi memicu kecemburuan sosial serta menurunkan kohesi sosial dalam komunitas.

Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat menunjukkan adanya sikap ambivalen terhadap keberadaan industri. Masyarakat mengakui adanya manfaat ekonomi yang dihasilkan, namun juga mengungkapkan ketidakpuasan terhadap dampak lingkungan seperti polusi debu serta minimnya realisasi program pembangunan dan bantuan sosial dari perusahaan. Kondisi ini menimbulkan gejala *unintended consequences*, yaitu dampak yang tidak diharapkan dari suatu kebijakan akibat lemahnya implementasi dan distribusi manfaat.

Aspek ekonomi komunitas menunjukkan adanya pergeseran dari kemandirian berbasis sumber daya alam menuju ketergantungan pada sektor industri. Penjualan lahan oleh masyarakat kepada perusahaan atau pihak luar menjadi indikator melemahnya kontrol masyarakat terhadap sumber daya lokal. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi mengurangi ketahanan ekonomi masyarakat.

Observasi lapangan menunjukkan adanya potensi konflik sosial, terutama terkait penggunaan lahan dan akses jalan yang dimanfaatkan secara bersamaan oleh masyarakat dan perusahaan. Konflik terbuka relatif dapat dikelola, namun potensi ketegangan tetap ada akibat belum terselesaikannya beberapa permasalahan secara menyeluruh.

Kemampuan adaptasi masyarakat juga terlihat dalam menghadapi perubahan. Sebagian masyarakat memanfaatkan peluang ekonomi baru dengan membuka usaha di sektor jasa dan perdagangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa industrialisasi tidak hanya menimbulkan dampak negatif, tetapi juga mendorong munculnya strategi adaptasi ekonomi di tingkat lokal.

Kelompok masyarakat pesisir, khususnya nelayan, merupakan pihak yang paling terdampak. Aktivitas industri di wilayah pesisir menyebabkan perubahan kualitas lingkungan laut, berkurangnya area tangkap, serta menurunnya hasil produksi. Dampak tersebut meningkatkan biaya operasional dan menurunkan pendapatan nelayan, sehingga memperkuat ketimpangan ekonomi antar kelompok masyarakat. Bantuan kompensasi yang diberikan perusahaan belum mampu menjadi solusi jangka panjang.

Dampak terhadap masyarakat menunjukkan karakter yang ambivalen. Industrialisasi mendorong pertumbuhan ekonomi dan modernisasi desa, namun juga

menimbulkan ketimpangan sosial, tekanan lingkungan, serta perubahan nilai budaya. Samodra Wibawa (1994) menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan publik tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan masyarakat dalam mempertahankan keseimbangan sosial dan pemerataan kesejahteraan.

Kesimpulan menunjukkan bahwa kebijakan industrialisasi di Kecamatan Bungku Barat telah mengubah struktur dan dinamika masyarakat secara signifikan. Industrialisasi memberikan peluang ekonomi, namun juga menimbulkan tantangan sosial dan lingkungan yang memerlukan perhatian serius. Kondisi ini menegaskan perlunya peran aktif pemerintah dan perusahaan dalam memperkuat kohesi sosial, meningkatkan pemberdayaan masyarakat lokal, serta memastikan distribusi manfaat yang lebih adil dan berkelanjutan.

#### **4. Dampak Terhadap Lembaga dan Sistem Sosial**

Kebijakan industrialisasi melalui kehadiran PT Indonesia Huabao Industrial Park (IHIP) memengaruhi kinerja lembaga pemerintahan serta sistem sosial di tingkat lokal. Industrialisasi menghadirkan dinamika baru dalam hubungan antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat yang menuntut penyesuaian fungsi kelembagaan, terutama dalam aspek koordinasi, pengawasan, dan pelayanan publik. Dalam perspektif evaluasi kebijakan publik, Samodra Wibawa (1994) menegaskan bahwa dampak kebijakan dapat dilihat dari sejauh mana kebijakan tersebut memengaruhi kapasitas lembaga dalam menjaga keseimbangan sosial serta menjalankan fungsi secara efektif di tengah perubahan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah kecamatan berperan sebagai mediator antara masyarakat dan perusahaan. Peran tersebut tercermin melalui upaya mediasi dalam menyelesaikan konflik terkait lahan, peluang usaha, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Implementasi hasil mediasi di lapangan belum berjalan optimal akibat lemahnya koordinasi antar lembaga serta dominasi manajemen perusahaan yang cenderung tertutup dan terpusat. Kondisi ini mencerminkan ketimpangan kekuasaan dalam sistem kelembagaan, di mana pemerintah daerah memiliki keterbatasan dalam mengontrol kebijakan operasional perusahaan.

Tingkat desa memperlihatkan peran pemerintah desa sebagai penghubung antara masyarakat dan perusahaan, terutama dalam proses sosialisasi, penyaluran bantuan, serta penyampaian aspirasi masyarakat. Keterlibatan pemerintah desa dalam pengambilan keputusan strategis masih sangat terbatas. Program tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) cenderung bersifat jangka pendek dan seremonial, seperti pembagian bantuan sembako dan fasilitas kebersihan, serta belum menyentuh aspek pemberdayaan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Kondisi ini menunjukkan bahwa posisi pemerintah desa dalam sistem kelembagaan masih relatif lemah.

Aspek sistem sosial menunjukkan adanya perubahan struktur sosial yang signifikan. Masuknya pendatang dan meningkatnya aktivitas ekonomi menyebabkan

peningkatan kepadatan penduduk serta munculnya berbagai persoalan sosial, seperti meningkatnya volume sampah, gangguan keamanan, dan potensi konflik sosial. Pergeseran mata pencaharian masyarakat dari sektor agraris dan perikanan menuju sektor industri dan jasa menunjukkan terjadinya proses *structural transformation* yang belum sepenuhnya diimbangi dengan kesiapan sosial dan kapasitas sumber daya manusia lokal.

Distribusi manfaat ekonomi menunjukkan adanya ketimpangan yang cukup nyata. Masyarakat yang memiliki modal dan akses lebih baik mampu beradaptasi dengan peluang ekonomi baru, sementara kelompok masyarakat tradisional seperti petani dan nelayan mengalami kesulitan dalam mempertahankan sumber penghidupannya. Kondisi ini memperlihatkan meningkatnya kesenjangan sosial di tingkat lokal.

Aspek kelembagaan memperlihatkan lemahnya koordinasi antar aktor sebagai salah satu faktor utama yang menghambat optimalisasi dampak positif industrialisasi. Mekanisme koordinasi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat cenderung bersifat reaktif, yaitu dilakukan ketika terjadi konflik atau keluhan. Upaya preventif serta perencanaan jangka panjang dalam pengelolaan dampak sosial dan lingkungan belum berjalan secara sistematis. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem kelembagaan belum mampu beradaptasi secara optimal terhadap perubahan yang dihasilkan oleh kebijakan industrialisasi.

Temuan penelitian menunjukkan adanya persoalan struktural yang masih berlangsung, seperti konflik lahan, ketimpangan tenaga kerja antara masyarakat lokal dan pendatang, serta keterbatasan akses masyarakat terhadap peluang ekonomi di sektor industri. Kondisi ini mencerminkan munculnya *unintended consequences* dari kebijakan industrialisasi, di mana tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat belum tercapai secara merata.

Dampak kebijakan industrialisasi terhadap lembaga dan sistem sosial menunjukkan karakter yang ambivalen. Industrialisasi mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka peluang kerja baru, namun juga melemahkan kapasitas kelembagaan lokal, meningkatkan ketimpangan sosial, serta memunculkan berbagai persoalan sosial dan lingkungan.

Kesimpulan menunjukkan bahwa penguatan peran lembaga pemerintah lokal, peningkatan transparansi perusahaan, serta integrasi program pemberdayaan masyarakat menjadi kebutuhan utama dalam menghadapi dinamika industrialisasi. Upaya tersebut diperlukan agar proses industrialisasi dapat berjalan secara inklusif dan berkelanjutan.

Temuan ini sejalan dengan teori Samodra Wibawa (1994) yang menyatakan bahwa keberhasilan kebijakan publik tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan sistem sosial dan kelembagaan dalam menjaga keseimbangan serta keberlanjutan kehidupan masyarakat.

## Pembahasan

### 1. Dampak Individual

Dampak individual dari kebijakan industrialisasi melalui kehadiran PT Indonesia Huabao Industrial Park (IHIP) di Kecamatan Bungku Barat menunjukkan adanya transformasi sosial-ekonomi yang kompleks dan tidak merata. Perubahan tersebut tidak hanya menciptakan peluang ekonomi baru, tetapi juga menimbulkan tekanan sosial, ekonomi, dan lingkungan bagi individu, khususnya pada kelompok masyarakat tradisional seperti petani dan nelayan.

Perspektif evaluasi kebijakan publik menurut (Tobing *et al.*, 2025) menjelaskan bahwa kebijakan ekonomi publik yang tidak disertai mekanisme distribusi yang efektif dapat memperlebar kesenjangan sosial, sedangkan kebijakan yang bersifat inklusif dan redistributif berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata serta mengurangi ketimpangan pendapatan. Kondisi di Kecamatan Bungku Barat menunjukkan bahwa kebijakan industrialisasi belum sepenuhnya menghadirkan kesejahteraan yang inklusif, melainkan menciptakan pola dualisme ekonomi antara sektor industri dan sektor tradisional.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa individu yang sebelumnya bekerja di sektor pertanian dan perikanan mengalami tekanan ekonomi akibat menurunnya produktivitas dan berkurangnya tenaga kerja. Fenomena ini sejalan dengan penelitian (Saleh and Sumarsono, 2016) yang menemukan bahwa perubahan struktur ekonomi ini juga mencerminkan adanya pergeseran tenaga kerja antar sektor yang dipengaruhi oleh peluang kerja dan dinamika pembangunan wilayah, sehingga sektor pertanian kehilangan tenaga kerja produktif dalam jangka panjang.

Dampak terhadap nelayan yang kehilangan akses terhadap wilayah tangkap akibat aktivitas industri menunjukkan adanya tekanan ekologis yang berimplikasi langsung terhadap ekonomi individu. Temuan ini konsisten dengan penelitian (Halpern *et al.*, 2019) yang menyatakan bahwa tekanan antropogenik di wilayah pesisir, termasuk aktivitas ekstraktif dan pembangunan industri, merupakan salah satu penyebab utama degradasi ekosistem laut. Dampak yang ditimbulkan meliputi penurunan kualitas air, kerusakan habitat, serta penurunan stok ikan yang berdampak langsung pada komunitas nelayan kecil. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa industrialisasi tanpa pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan akan meningkatkan kerentanan ekonomi kelompok masyarakat pesisir.

Aspek sosial dan psikologis menunjukkan adanya perasaan ambivalensi di kalangan masyarakat. Industrialisasi membuka peluang kerja dan meningkatkan aktivitas ekonomi lokal, namun juga menimbulkan kecemasan, rasa tidak berdaya (*powerlessness*), serta kekhawatiran terhadap perubahan nilai sosial. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Muna and Meiji, 2025) yang menunjukkan bahwa transformasi sosial menunjukkan bahwa modernisasi dan industrialisasi di pedesaan berkontribusi terhadap perubahan pola hubungan sosial masyarakat, termasuk melemahnya solidaritas tradisional dan meningkatnya individualisme akibat perubahan struktur ekonomi dan gaya hidup.

Ketimpangan distribusi manfaat industrialisasi menjadi isu utama dalam dampak individual. Sebagian masyarakat memperoleh keuntungan ekonomi dari kehadiran industri, terutama mereka yang memiliki akses terhadap pekerjaan formal. Kelompok masyarakat dengan keterbatasan pendidikan dan keterampilan cenderung tertinggal dan hanya menjadi penonton dalam proses pembangunan. Temuan ini diperkuat oleh penelitian (Rauf *et al.*, 2021) yang menyatakan bahwa ekspansi industri di wilayah yang bergantung pada sumber daya alam dapat meningkatkan ketimpangan pendapatan, terutama ketika transformasi ekonomi dari sektor agraris ke industri tidak diikuti dengan pemerataan kapasitas tenaga kerja dan akses terhadap peluang ekonomi baru. Dalam konteks ini, rumah tangga yang memiliki modal, pendidikan, dan koneksi lebih baik cenderung lebih mampu memanfaatkan peluang industri dibandingkan kelompok rentan, sehingga memperlebar kesenjangan sosial-ekonomi di tingkat lokal.

Dampak lingkungan seperti polusi udara berupa debu dan menurunnya kualitas lingkungan juga berpengaruh langsung terhadap kualitas hidup individu. Kondisi ini menunjukkan bahwa dampak kebijakan industrialisasi tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga multidimensional yang mencakup aspek kesehatan dan kenyamanan hidup masyarakat.

Temuan penelitian ini juga dapat diperkaya dengan hasil penelitian (Subandi, Ahsan and Arief, 2026) yang mengkaji implementasi kebijakan Apostille di Kota Palu. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan sangat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman masyarakat, efektivitas komunikasi, serta dukungan kelembagaan. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur kebijakan menjadi hambatan utama dalam implementasi, sehingga diperlukan sosialisasi dan edukasi publik yang lebih optimal. Relevansi temuan ini dalam konteks penelitian menunjukkan bahwa dampak kebijakan tidak hanya ditentukan oleh substansi kebijakan, tetapi juga oleh kapasitas individu dalam memahami dan mengakses peluang yang dihasilkan. Kondisi serupa terlihat di Kecamatan Bungku Barat, di mana keterbatasan pengetahuan, pendidikan, dan keterampilan menyebabkan sebagian masyarakat tidak mampu beradaptasi secara optimal terhadap perubahan akibat industrialisasi.

Pembahasan ini menegaskan bahwa dampak individual dari kebijakan industrialisasi di Kecamatan Bungku Barat bersifat paradoksal. Industrialisasi mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, namun belum sepenuhnya menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat. Ketimpangan akses terhadap peluang ekonomi, degradasi lingkungan, serta perubahan nilai sosial menunjukkan bahwa kebijakan industrialisasi masih memerlukan pendekatan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

## 2. Dampak Individual

Dampak organisasional dari kebijakan industrialisasi melalui beroperasinya PT Indonesia Huabao Industrial Park (IHIP) di Kecamatan Bungku Barat menunjukkan

adanya perubahan signifikan dalam struktur, peran, dan relasi antar-lembaga di tingkat lokal. Transformasi ini tidak hanya terjadi pada lembaga pemerintah, tetapi juga meluas pada organisasi masyarakat dan lembaga sosial lainnya yang terlibat dalam dinamika pembangunan industri nikel.

Temuan ini sejalan dengan pandangan Samodra Wibawa (1994) yang menyatakan bahwa kebijakan publik tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga memengaruhi efektivitas dan adaptabilitas organisasi pelaksana kebijakan. Dalam konteks Bungku Barat, pemerintah kecamatan dan desa mengalami perluasan fungsi dari sekadar administratif menjadi mediator konflik sosial-ekonomi antara masyarakat dan perusahaan.

Pemerintah lokal berada pada posisi yang ambivalen, yaitu di satu sisi dituntut untuk mendukung investasi dan pertumbuhan ekonomi, namun di sisi lain harus merespons berbagai keluhan masyarakat terkait dampak sosial dan lingkungan. Kondisi ini memperlihatkan adanya beban kelembagaan yang meningkat tanpa diimbangi dengan peningkatan kewenangan dan kapasitas organisasi. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Al-Banna, Adiyanta and Azhar, 2023) yang menemukan bahwa perubahan kebijakan pengelolaan pertambangan di Indonesia, khususnya setelah adanya sentralisasi kewenangan, justru menimbulkan tantangan baru bagi pemerintah daerah dalam aspek koordinasi dan pengawasan. Pemerintah daerah mengalami keterbatasan peran dalam pengawasan langsung, namun tetap dibebani tanggung jawab sosial dan administratif terkait dampak aktivitas tambang di wilayahnya, termasuk konflik sosial, lingkungan, dan distribusi manfaat ekonomi.

Relasi antar-lembaga menunjukkan bahwa hubungan antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat bersifat asimetris. Perusahaan memiliki kontrol yang lebih besar terhadap sumber daya ekonomi dan keputusan strategis, sementara pemerintah lokal lebih banyak berperan sebagai fasilitator dan perantara. Kondisi ini mengindikasikan adanya ketimpangan kekuasaan kelembagaan yang berdampak pada efektivitas tata kelola pemerintahan daerah. Temuan ini diperkuat oleh penelitian (Halisra *et al.*, 2024) yang menyatakan bahwa dampak ekonomi pertambangan di Desa Sanggula tidak merata di masyarakat lokal.

Tingkat organisasi desa menunjukkan bahwa pemerintah desa mengalami peningkatan aktivitas kelembagaan akibat masuknya perusahaan, terutama dalam pengelolaan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan penanganan aspirasi masyarakat. Namun, peningkatan aktivitas tersebut tidak selalu diikuti oleh penguatan kapasitas kelembagaan. Pemerintah desa lebih banyak berperan sebagai pelaksana administratif dan penyalur informasi, bukan sebagai pengambil keputusan strategis. Fenomena ini menunjukkan adanya *institutional dependency*, yaitu ketergantungan organisasi lokal terhadap aktor eksternal dalam proses pengambilan keputusan pembangunan.

Organisasi masyarakat sipil seperti LSM dan serikat buruh juga mengalami peningkatan peran dalam melakukan advokasi dan pengawasan sosial. Namun, keterbatasan sumber daya, akses informasi, serta kekuatan regulatif menyebabkan

efektivitas organisasi ini masih terbatas. Kondisi ini sejalan dengan penelitian (Khaz *et al.*, 2026) yang menyatakan bahwa organisasi masyarakat sipil memainkan peran penting dalam tata kelola sumber daya alam, terutama dalam aspek pengawasan lingkungan, transparansi, dan pemberdayaan masyarakat terdampak industri ekstraktif. Namun, efektivitas peran tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya, rendahnya kapasitas advokasi, serta kurangnya akses terhadap proses pengambilan keputusan kebijakan publik, sehingga pengaruhnya terhadap kebijakan sering kali bersifat tidak langsung.

Relasi antar-lembaga menunjukkan bahwa koordinasi antara pemerintah kecamatan, desa, dan perusahaan masih bersifat formal dan reaktif. Mekanisme kerja sama lebih banyak berfokus pada penyelesaian masalah jangka pendek seperti kompensasi, bantuan sosial, dan pengelolaan sampah, bukan pada penguatan kelembagaan jangka panjang. Kondisi ini menunjukkan bahwa tata kelola kolaboratif (*collaborative governance*) belum berjalan secara optimal di tingkat lokal.

Penelitian oleh (Hamzah, Asrifai and Rapi, 2024) menunjukkan bahwa penerapan *Electronic Government* di Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Kabupaten Pasangkayu telah berjalan melalui beberapa aspek utama, yaitu strategi, kebijakan, data, faktor biaya, keterampilan, dan teknologi. Pada aspek strategi, dilakukan sosialisasi kepada masyarakat serta penguatan sinergi antar-OPD. Pada aspek kebijakan, implementasi mengacu pada regulasi seperti Instruksi Presiden yang diturunkan dalam Rencana Strategis (*Renstra*). Pada aspek data, informasi disediakan dan dapat diakses melalui website. Pada aspek faktor biaya, penganggaran difokuskan pada pengembangan SDM dan teknologi informasi. Pada aspek keterampilan, dilakukan pelatihan melalui bimbingan teknis (*BIMTEK*). Pada aspek teknologi, tersedia dukungan jaringan publik seperti Wi-Fi dan jaringan internet lokal.

Keseluruhan temuan menunjukkan bahwa dampak organisasional dari kehadiran PT IHIP memperlihatkan paradoks kelembagaan. Industrialisasi mendorong peningkatan aktivitas organisasi dan memperluas ruang koordinasi antar-lembaga, namun juga menimbulkan tekanan kelembagaan berupa beban kerja berlebih, ketimpangan kewenangan, serta rendahnya kapasitas adaptif organisasi lokal dalam menghadapi perubahan yang cepat.

### 3. Dampak Individual

Industrialisasi melalui beroperasinya PT Indonesia Huabao Industrial Park (IHIP) di Kecamatan Bungku Barat memberikan dampak yang bersifat multidimensional, mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Temuan ini menunjukkan bahwa kebijakan industrialisasi tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi lokal, tetapi juga memunculkan konsekuensi sosial yang kompleks dan tidak merata di tingkat masyarakat.

Aspek ekonomi menunjukkan bahwa kehadiran industri nikel telah meningkatkan peluang kerja dan mendorong tumbuhnya aktivitas ekonomi baru di sekitar wilayah penelitian. Masyarakat memperoleh manfaat melalui pembukaan

lapangan pekerjaan, peningkatan pendapatan sebagian kelompok, serta berkembangnya usaha kecil seperti kos-kosan, warung makan, dan perdagangan lokal. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Irfat, Lampe and Mahfuzat, 2025) yang menyatakan bahwa kebijakan pembangunan, khususnya pada sektor industri ekstraktif seperti pertambangan, sangat dipengaruhi oleh model tata kelola kolaboratif antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat lokal. Dalam konteks tersebut, program *Corporate Social Responsibility* (CSR) menjadi instrumen penting dalam mengurangi dampak negatif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar wilayah industri.

Aspek sosial menunjukkan adanya perubahan struktur masyarakat Bungku Barat yang ditandai dengan pergeseran mata pencaharian dari sektor agraris dan perikanan menuju sektor industri dan jasa. Perubahan ini juga diikuti oleh meningkatnya jumlah pendatang yang bekerja di kawasan industri, sehingga mengubah karakter masyarakat yang sebelumnya homogen menjadi lebih heterogen dan kompleks. Meskipun hubungan sosial antara pendatang dan masyarakat lokal masih relatif harmonis, muncul gejala melemahnya solidaritas sosial tradisional seperti gotong royong serta meningkatnya pola hidup individualistis. Temuan ini sejalan dengan (Mirandimahyana *et al.*, 2023) yang menjelaskan bahwa kehadiran industri pertambangan di wilayah pedesaan menyebabkan perubahan sosial yang signifikan, termasuk perubahan gaya hidup, struktur pekerjaan, dan pola hubungan sosial masyarakat. Transformasi dari ekonomi agraris menuju ekonomi berbasis industri mendorong terjadinya mobilitas tenaga kerja, masuknya penduduk pendatang, serta perubahan nilai dan norma sosial masyarakat lokal.

Aspek lingkungan menunjukkan bahwa dampak yang paling dirasakan masyarakat adalah meningkatnya polusi debu, penurunan kualitas air, serta terganggunya wilayah pesisir akibat aktivitas industri dan transportasi berat. Keluhan masyarakat pesisir terkait menurunnya hasil tangkapan ikan dan rusaknya area budidaya rumput laut menunjukkan adanya tekanan ekologis yang signifikan. Kondisi ini sejalan dengan temuan (Halpern *et al.*, 2019) yang menyatakan bahwa ekspansi industri ekstraktif seperti pertambangan memiliki dampak ganda terhadap pembangunan daerah. Meskipun mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pendapatan fiskal, aktivitas ini juga menghasilkan eksternalitas negatif berupa deforestasi, degradasi lahan, serta pencemaran air dan udara yang berdampak pada masyarakat lokal yang menggantungkan hidup pada sumber daya alam.

Analisis menggunakan perspektif evaluasi kebijakan publik Samodra Wibawa (1994) menunjukkan bahwa dampak kebijakan industrialisasi di Bungku Barat bersifat ambivalen. Kebijakan ini meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat tertentu dan membuka akses terhadap sumber daya ekonomi baru. Namun di sisi lain, kebijakan tersebut juga menghasilkan dampak tidak diinginkan (*unintended consequences*) berupa ketimpangan sosial, degradasi lingkungan, serta melemahnya keberlanjutan mata pencaharian masyarakat tradisional. Hal ini menunjukkan bahwa

keberhasilan kebijakan tidak dapat diukur hanya dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu menjaga keseimbangan sosial dan ekologis masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses adaptasi masyarakat terhadap industrialisasi berlangsung secara tidak merata. Kelompok masyarakat yang memiliki akses terhadap pekerjaan industri cenderung mengalami peningkatan kesejahteraan, sementara kelompok petani dan nelayan mengalami tekanan ekonomi akibat berkurangnya sumber daya produksi. Kondisi ini memperkuat temuan penelitian terdahulu bahwa transformasi ekonomi berbasis industri di wilayah pertambangan sering kali menghasilkan pola pembangunan yang tidak inklusif, di mana sebagian masyarakat tertinggal dalam proses perubahan tersebut.

Keseluruhan pembahasan menegaskan bahwa industrialisasi di Bungku Barat merupakan fenomena pembangunan yang bersifat dua sisi (*dual effect*), yaitu memberikan manfaat ekonomi sekaligus menimbulkan dampak sosial dan lingkungan yang signifikan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran pemerintah dan perusahaan dalam bentuk kebijakan yang lebih inklusif, khususnya melalui program pemberdayaan masyarakat lokal, penguatan kompensasi yang berkelanjutan, serta pengendalian dampak lingkungan secara lebih ketat agar manfaat industrialisasi dapat dirasakan secara lebih adil dan berkelanjutan.

#### 4. Dampak terhadap Lembaga dan Sistem Sosial

Kebijakan industrialisasi melalui beroperasinya PT Indonesia Huabao Industrial Park (IHIP) tidak hanya berdampak pada perubahan sosial-ekonomi masyarakat, tetapi juga membawa konsekuensi signifikan terhadap kelembagaan pemerintahan lokal dan sistem sosial masyarakat Bungku Barat. Perubahan ini terutama terlihat pada pergeseran peran pemerintah desa dan kecamatan yang kini lebih berfungsi sebagai mediator antara masyarakat dan perusahaan dibandingkan sebagai aktor utama dalam pengambilan keputusan pembangunan lokal.

Secara kelembagaan, pemerintah kecamatan dan desa menghadapi keterbatasan dalam menjalankan fungsi regulasi, pengawasan, dan pengendalian dampak industri. Relasi antara pemerintah daerah dan perusahaan cenderung bersifat asimetris, di mana perusahaan memiliki posisi dominan dalam pengambilan keputusan strategis yang berdampak langsung pada masyarakat. Kondisi ini mengindikasikan adanya pelemahan kapasitas institusional pemerintah lokal dalam tata kelola sumber daya dan konflik sosial. Temuan ini sejalan dengan (Sidiq and Loka, 2025) yang menyatakan bahwa pembangunan smelter nikel sebagai bagian dari kebijakan hilirisasi berpotensi memicu konflik sosial, ekonomi, dan lingkungan akibat ketimpangan relasi kekuasaan antar aktor. Dalam konteks Parigi Moutong, peran pemerintah daerah dalam merespons dinamika tersebut belum berjalan secara optimal, khususnya dalam fungsi sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator. Sebagai regulator, pemerintah dinilai lemah karena belum adanya regulasi daerah yang secara spesifik mengatur perlindungan kepentingan lokal. Sebagai dinamisator, pemerintah cenderung pasif

dengan minimnya sosialisasi dan terbatasnya ruang dialog. Sementara sebagai fasilitator, pemerintah belum mampu menjembatani kepentingan para pihak karena belum terbentuknya forum komunikasi multipihak yang efektif. Kondisi ini menunjukkan bahwa respons kebijakan pemerintah masih bersifat reaktif dan belum mampu mengelola potensi konflik secara komprehensif, sehingga berimplikasi pada munculnya ketegangan sosial akibat ketidakadilan kompensasi lahan, kekhawatiran pencemaran lingkungan, serta ketimpangan distribusi manfaat ekonomi.

Perspektif sistem sosial, industrialisasi menyebabkan perubahan pola relasi antaraktor, yaitu pemerintah, masyarakat, dan perusahaan. Sistem sosial yang sebelumnya relatif sederhana dan berbasis komunitas lokal berubah menjadi lebih kompleks dan terfragmentasi. Pemerintah desa dan kecamatan berperan sebagai jembatan komunikasi, namun fungsi tersebut belum berjalan optimal karena keterbatasan kewenangan dan lemahnya implementasi hasil kesepakatan dengan pihak perusahaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem sosial lokal mengalami transformasi dari sistem berbasis komunitas menuju sistem berbasis kepentingan ekonomi industri.

Temuan ini diperkuat oleh (Aprilia and Ahdiah, 2025) yang menjelaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang signifikan di Indonesia yang dipicu oleh ketidaksetaraan gender. Dalam konteks Kota Palu, tingginya angka kasus menunjukkan urgensi penanganan yang bersifat kolaboratif. Implementasi *Collaborative Governance* (CG) dalam penanganan kasus tersebut menunjukkan bahwa kolaborasi didorong oleh kebutuhan bersama untuk mengatasi hambatan penanganan kasus. Lembaga seperti Libu Perempuan berperan sebagai fasilitator layanan rujukan terpadu, sementara desain institusional menekankan penguatan koordinasi, penegakan peraturan daerah, serta sistem rujukan yang menolak mediasi dalam kasus kekerasan seksual. Proses kolaborasi menunjukkan adanya pembagian peran yang adaptif dan sinergis antar aktor. Meskipun kolaborasi telah berjalan secara efektif, keberlanjutannya masih memerlukan penguatan kebijakan serta upaya mengatasi tantangan sosial-budaya.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa mekanisme koordinasi antar lembaga masih bersifat reaktif dan belum terintegrasi secara sistematis. Penyelesaian masalah sosial seperti konflik lahan, kompensasi, dan dampak lingkungan lebih sering dilakukan setelah muncul keluhan masyarakat, bukan melalui sistem mitigasi yang terencana. Kondisi ini menunjukkan adanya kelemahan dalam tata kelola kolaboratif (*collaborative governance*) antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat. Hal ini sejalan dengan (Aprilia, Asrifai and Ahdiah, 2025) yang menegaskan bahwa rendahnya partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain rendahnya literasi politik, kendala administratif kependudukan, faktor pekerjaan, mobilitas penduduk, serta persoalan zonasi pendidikan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses politik masih didominasi oleh kelompok pengamat dan apolitis, sementara hanya sebagian kecil yang berperan aktif sebagai aktivis dan partisipan.

Temuan ini menegaskan bahwa lemahnya kapasitas sosial dan institusional dalam mendorong partisipasi dapat berdampak pada rendahnya efektivitas proses politik di tingkat lokal.

Dalam kerangka teori evaluasi kebijakan publik Samodra Wibawa (1994), kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan industrialisasi di Bungku Barat menghasilkan dampak kelembagaan yang tidak sepenuhnya diantisipasi (*unintended institutional consequences*). Meskipun kebijakan tersebut berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, pada saat yang sama melemahkan kapasitas lembaga lokal dalam menjaga keseimbangan sosial dan ekologis masyarakat. Pemerintah desa dan kecamatan berada pada posisi yang ambigu, yaitu antara mendukung investasi dan melindungi kepentingan masyarakat.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa dampak industrialisasi PT IHIP terhadap lembaga dan sistem sosial bersifat ambivalen. Di satu sisi, terjadi peningkatan aktivitas ekonomi dan peluang kerja yang memperkuat dinamika sosial lokal. Di sisi lain, terjadi pelemahan fungsi kelembagaan pemerintah, ketimpangan relasi antaraktor, serta rendahnya efektivitas koordinasi dalam pengelolaan dampak sosial dan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan lokal, peningkatan transparansi perusahaan, serta penerapan model tata kelola kolaboratif yang lebih inklusif agar manfaat industrialisasi dapat terdistribusi secara lebih adil dan berkelanjutan.

## Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan pengembangan industri nikel melalui PT Indonesia Huabao Industrial Park (IHIP) di Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali, memberikan dampak yang signifikan dan multidimensional terhadap kehidupan sosial masyarakat berdasarkan analisis dampak kebijakan Samodra Wibawa (1994). Pada tingkat individu, terjadi perubahan mata pencaharian dan pola pendapatan masyarakat; pada tingkat organisasional, terdapat penyesuaian fungsi lembaga lokal dalam merespons keberadaan industri; pada tingkat masyarakat, muncul perubahan struktur sosial, relasi sosial, serta potensi konflik; dan pada tingkat sistem sosial, terlihat adanya tantangan dalam koordinasi kebijakan serta keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan perlindungan sosial. Secara keseluruhan, kebijakan hilirisasi nikel berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, namun sekaligus menimbulkan konsekuensi sosial yang perlu dikelola secara lebih adil dan berkelanjutan. Adapun keterbatasan penelitian ini terletak pada ruang lingkup wilayah yang terbatas, keterbatasan perspektif informan yang belum sepenuhnya mencakup pemerintah dan perusahaan secara seimbang, serta fokus analisis yang lebih menitikberatkan pada aspek sosial dibandingkan aspek ekonomi dan lingkungan secara mendalam. Oleh karena itu, direkomendasikan agar pemerintah memperkuat pengawasan dan memastikan keseimbangan implementasi kebijakan, perusahaan meningkatkan keterlibatan masyarakat melalui CSR yang lebih partisipatif, serta penelitian selanjutnya memperluas cakupan wilayah dan

menggunakan pendekatan campuran agar hasil kajian lebih komprehensif.

### Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Mahfuzat, S.IP, M.Si. selaku Pembimbing I dan Ibu Sulfitri Husain, S.I.P, M.A. selaku Pembimbing II atas arahan, bimbingan, dan masukan yang telah diberikan selama proses penelitian ini. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kecamatan Bungku Barat, pemerintah desa terkait, serta seluruh informan penelitian yang telah memberikan izin, dukungan, dan data sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik. Terima kasih juga disampaikan kepada pihak institusi atas dukungan akademik dan fasilitas yang diberikan selama proses penelitian.

### Referensi

- Addawiyah, Febrian, L. and Fadillah, N. (2025) "Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik dalam Mewujudkan Pelayanan Publik yang Responsif: Tinjauan Teoritis dan Empiris," *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 4(1), pp. 27–35. Available at: <https://doi.org/10.55606/jurrish.v4i1.4438>.
- Al-Banna, H., Adiyanta, F.C.S. and Azhar, M. (2023) "Volume 12, Nomor 4, Tahun 2023 Website: <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/>," *DIPONEGORO LAW JOURNAL*, 12(4).
- Aprilia, N. and Ahdiah, I. (2025) "PENANGANAN KEKERASAN PEREMPUAN: STUDI KASUS LIBU PEREMPUAN PALU," *JSIP: Jurnal Studi Inovasi Pemerintahan*, 1(5), pp. 348–358.
- Aprilia, N., Asrifai and Ahdiah, I. (2025) "PENANGANAN KEKERASAN PEREMPUAN: STUDI KASUS LIBU PEREMPUAN PALU," *JSIP: Jurnal Studi Inovasi Pemerintahan*, 1(5), pp. 348–358.
- Fauzi, R.M. and Nulhaqim, S.A. (2024) "MASALAH KONFLIK PERTAMBANGAN DI INDONESIA MINING CONFLICT ISSUES IN INDONESIA," *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 6(1), pp. 34–41. Available at: <https://doi.org/10.24198/jkrk.v6i1.53283>.
- Halisra *et al.* (2024) "DAMPAK KEBIJAKAN PERTAMBANGAN TERHADAP KETAHANAN MASYARAKAT DESA (Studi Kasus Desa Sanggula Kecamatan Moramo Utara Kabupaten Konawe Selatan)," *Journal Publicuho*, 7(3), pp. 1711–1725. Available at: <https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.539>.
- Halpern, B.S. *et al.* (2019) "Recent pace of change in human impact on the world's ocean," *Scientific Reports*, 9(1), p. 11609. Available at: <https://doi.org/10.1038/s41598-019-47201-9>.
- Hamzah, A.Y., Asrifai and Rapi, M. (2024) "Penerapan Electronic Government di Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Pasangkayu," *JSIP: Jurnal Studi Inovasi Pemerintahan*, 1(1), pp. 40–58.
- Hanifah, H.T. *et al.* (2025) "Potensi Ekonomi Pertambangan Nikel Sebagai Baterai Kendaraan Listrik Dan Dampaknya Terhadap Lingkungan," *Jurnal Ekosains*,

- 17(2).
- Haryadi, D. (2018) *PENGANTAR HUKUM PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA*. Cet 1. Bangka Belitung: UBB Press. Available at: [https://fh.ubb.ac.id/img\\_ubb/file1/Buku/Pengantar%20hukum%20pertambangan%20mineral%20dan%20batu%20bara%20\(1\).pdf](https://fh.ubb.ac.id/img_ubb/file1/Buku/Pengantar%20hukum%20pertambangan%20mineral%20dan%20batu%20bara%20(1).pdf).
- Hidayat, S. (2025) "Hilirisasi Mineral Pengelolaan Nikel di Indonesia: Regulasi serta Dampak Implementasinya Pada Ekonomi dan Pembangunan Smelter," *Journal Scientific of Mandalika (JSM) e-ISSN 2745-5955 | p-ISSN 2809-0543*, 6(9), pp. 3610–3619. Available at: <https://doi.org/10.36312/10.36312/vol6iss9pp3610-3619>.
- Irfat, Lampe, I. and Mahfuzat (2025) "Tata Kelola Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) PT Vale di Desa Ululere, Morowali," *JSIP: Jurnal Studi Inovasi Pemerintahan*, 1(5), pp. 359–382.
- Karsadi and Aso, L. (2023) "Multidimensional Impacts of Nickel Mining Exploitation towards the Lives of the Local Community," *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 12(2), pp. 222–227. Available at: <https://doi.org/10.23887/jish.v12i2.58881>.
- Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral (2021) *Kementerian ESDM Luncurkan Dokumen Kebijakan Mineral dan Batubara*, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Jakarta Pusat. Available at: <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/kementerian-esdm-luncurkan-dokumen-kebijakan-mineral-dan-batubara>.
- Khaz, F.H. *et al.* (2026) "Peran Civil Society dalam Mengawal Transparansi Kebijakan Publik di Indonesia," *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 6(1), p. 22. Available at: <https://doi.org/10.53697/iso.v6i1.3623>.
- Lampe, I. (2021) "Isu-isu industrialisasi nikel dan pengelolaan komunikasi korporat di kawasan industri Morowali," *PRofesi Humas Jurnal Ilmiah Ilmu Hubungan Masyarakat*, 6(1), p. 1. Available at: <https://doi.org/10.24198/prh.v6i1.30603>.
- Mirandimahyana, M. *et al.* (2023) "SOCIAL CHANGES IN RURAL COMMUNITIES DUE TO MINING INDUSTRY ACTIVITIES: PERUBAHAN SOSIAL DI MASYARAKAT PEDESAAN AKIBAT AKTIVITAS INDUSTRI TAMBANG," *Progress In Social Development*, 4(2), pp. 42–49. Available at: <https://doi.org/10.30872/psd.v4i2.70>.
- Muna, N.N. and Meiji, N.H.P. (2025) "Dinamika Perubahan Sosial Masyarakat dalam Keberlanjutan Industri Kerajinan Tangan di Kampung Wisata UMKM Rejoso, Junrejo, Kota Batu," *Jurnal Perspektif*, 8(2), pp. 200–211. Available at: <https://doi.org/10.24036/perspektif.v8i2.1133>.
- Ningsih, D.A.S. and Nawireja, I.K. (2023) "Dampak Pertambangan Batubara terhadap Kesejahteraan Petani Karet (Kasus: Desa Padang Panjang, Kecamatan Tanta, Tabalong, Kalimantan Selatan)," *Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM]*, 7(2), pp. 234–248. Available at: <https://doi.org/10.29244/jskpm.v7i2.1213>.
- Permata, R.R., Safiranita, T. and Utama, B. (2019) "Tinjauan Kasus Tentang Dilusi Merek Di Indonesia Dan Thailand," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 26(1).

- Available at: <https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss1.art1>.
- Presiden Republik Indonesia (2009) *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP*. Available at: <https://peraturan.bpk.go.id/Download/28100/UU%20Nomor%2032%20Tahun%202009.pdf>.
- Presiden Republik Indonesia (2020) *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA*. Available at: <https://peraturan.bpk.go.id/Download/130200/UU%20Nomor%203%20Tahun%202020.pdf>.
- Rauf, R.A. *et al.* (2021) "Industrialization and regional income inequality: agriculture transformation," *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 681(1), p. 012088. Available at: <https://doi.org/10.1088/1755-1315/681/1/012088>.
- Saleh, M. and Sumarsono, S. (2016) "PERGESERAN SEKTOR EKONOMI DAN PENYERAPAN TENAGA KERJA DI JAWA TIMUR," *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 6(1), pp. 87–103.
- Sidiq, M.A. and Loka, D.M. (2025) "Respons Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Potensi Konflik Pembangunan Smelter Nikel Di Parigi Moutong," *JSIP: Jurnal Studi Inovasi Pemerintahan*, 1(5), pp. 383–397.
- Subandi, A.A., Ahsan, S.C. and Arief, M. (2026) "Kementerian Hukum di Sulawesi Tengah (Studi Kasus Kota Palu)," *JSIP: Jurnal Studi Inovasi Pemerintahan*, 2(1), pp. 01–22.
- Tahalea, S.N., Suwitri, S. and Rostyaningsih, D. (2015) "Evaluasi Dampak Kebijakan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Semarang," *Journal of Public Policy and Management Review*, 4(3), pp. 387-399.
- Tobing, L.M.L. *et al.* (2025) "Dampak Kebijakan Ekonomi Terhadap Ketidaksetaraan Sosial di Negara Berkembang," *JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 01(03), pp. 349–354.
- Waniatri, W., Muslihudin, M. and Lestari, S. (2022) "Dampak Sosial, Ekonomi dan Lingkungan Pertambangan Pasir di Desa Luragung Landeuh Kuningan, Jawa Barat," *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 20(2), pp. 279–290. Available at: <https://doi.org/10.14710/jil.20.2.279-290>.
- Womal, A.M. (2023) "Kajian Pengaruh Pembangunan Smelter Nikel di Wilayah Ekonomi Khusus Provinsi Sulawesi Tenggara," *Jurnal Ilmiah Lingkungan Kebumihan*, 5(1), p. 15. Available at: <https://doi.org/10.31315/jilk.v5i1.6832>.